

Peranan Kapal Tol Laut dalam Menunjang Distribusi Logistik pada Daerah Tertinggal oleh PT. Subsea Lintas Globalindo Cabang Tanjung Perak Surabaya

Lias Epindo Ginting^{1*}, Dirhamsyah², Muhammad Sahid³

^{1,2}Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

³Prodi Nautika, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: liasepindo.ginting@gmail.com

Abstract. *The purpose of writing this paper is to find out the role of sea toll ships in supporting logistics distribution in disadvantaged areas by PT. Subsea Lintas Globalindo Tanjung Perak Surabaya branch. The methods used in data collection are the field method through observation, as well as the library research method, to understand the extent of the sea toll ship operated by PT. Subsea Lintas Globalindo Tanjung Perak Surabaya Branch contributes to smoothing the flow of logistics distribution to disadvantaged areas, especially in Eastern Indonesia. The results of the study show that sea toll ships play a strategic role in reducing the disparity in the price of goods, increasing logistics accessibility, and supporting equitable development and economic growth in remote areas. The obstacles faced include uncertain weather factors, limited port infrastructure, and coordination that still needs to be strengthened between related institutions. Therefore, better synergy is needed between the government, ship operators, and other stakeholders, including the private sector and local communities, to optimize the benefits of the sea toll program in a sustainable manner, improve distribution efficiency, and support equitable distribution of welfare throughout Indonesia.*

Keywords: *Disadvantaged Areas; Distribution; Equitable Development; Peranan; Strategic.*

Abstrak. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui peranan kapal tol laut dalam menunjang distribusi logistik pada daerah tertinggal oleh PT. Subsea Lintas Globalindo cabang Tanjung Perak Surabaya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode lapangan melalui observasi, serta metode pustaka (*library research*), untuk memahami sejauh mana kapal tol laut yang dioperasikan oleh PT. Subsea Lintas Globalindo Cabang Tanjung Perak Surabaya berkontribusi dalam memperlancar arus distribusi logistik ke daerah-daerah tertinggal, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapal tol laut memainkan peran strategis dalam menekan disparitas harga barang, meningkatkan aksesibilitas logistik, serta mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Kendala-kendala yang dihadapi meliputi faktor cuaca yang tidak menentu, keterbatasan infrastruktur pelabuhan, serta koordinasi yang masih perlu diperkuat antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, operator kapal, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk pihak swasta dan masyarakat lokal, untuk mengoptimalkan manfaat program tol laut secara berkelanjutan, meningkatkan efisiensi distribusi, dan mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci: Daerah Tertinggal; Distribusi; Pemerataan Pembangunan; Peranan; Strategis.

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. Angkutan laut memegang perananan penting untuk menunjang kelancaran proses distribusi logistik karena dinilai lebih praktis. Angkutan laut juga memiliki kapasitas pemuatan yang besar. Logistik sendiri seperti yang dikemukakan Ballou (1985) adalah aktivitas pergerakan-penyimpanan *move store* dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan titik-titik pengumpulan/ asal point of acquisition dan titik-titik konsumsi/ tujuan *point of consumption*.

Menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2015 Wilayah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan di Indonesia adalah suatu wilayah yang memiliki kriteria daerah berupa perekonomian masyarakat yang rendah, sumber daya manusia yang kurang berkualitas, kemampuan keuangan daerah yang 1 2 berkapita rendah, sarana dan prasarana yang belum memadai, aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau, serta karakteristik lain berupa faktor kedekatan geografis dengan perbatasan Indonesia dan negara lain, serta faktor geografis lain yang menghambat pengembangan wilayah. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, menjelaskan Tol Laut merupakan konsep pengangkutan laut untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan di Indonesia.

Tol laut sebagai sebuah konsep dirancang untuk memperkuat jalur pelayaran yang ditujukan bagi pemerataan pertumbuhan ke Indonesia bagian Timur, menurunkan biaya logistik juga menjamin ketersediaan pokok strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga relatif sama sehingga kesejahteraan rakyat semakin merata. Melalui program tol laut diharapkan akan dapat mempercepat integrasi antara kawasan pelabuhan dengan kawasan industri dan kawasan ekonomi untuk menopang kebutuhan akan arus barang dan logistik di pelabuhan.

Tol laut juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Karena melalui program ini dikembangkan kawasan industri atau kawasan ekonomi baru di sekitar pelabuhan utama maupun pelabuhan pengumpul agar terjadi kesinambungan pengangkutan barang. Tol laut merupakan suatu bentuk konektivitas laut melalui kapal-kapal besar dari wilayah Indonesia bagian barat menuju Indonesia bagian timur dan sebaliknya secara teratur, terencana, dan atau berkelanjutan

2. KAJIAN TEORITIS

Peranan

Menurut Nazri Zarman dan Banta Karollah (2023-3). Peranan adalah siapa mengerjakan apa. Dengan demikian jika si Fulan mengerjakan tugas mengirim hasil produksi ke agen-agen penjual, maka peranan si Fulan tersebut adalah petugas bagian pengiriman (*Delivery*). Si Pino bertugas mengerjakan tugas memasarkan hasil produksi, maka peranan si Pino adalah petugas bagian pemasaran atau marketing. Dengan demikian, maka kata peranan adalah sinonim (sama artinya) dengan jabatan.

Kapal Tol Laut

Menurut Prayudi Budi Utomo (2025-33), Tol Laut adalah program pemerintah untuk mewujudkan konektivitas laut secara efektif melalui kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dengan tujuan meningkatkan kelancaran distribusi dan mengurangi disparitas harga di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Tol laut menjadi sebuah solusi untuk mendukung distribusi hasil perikanan terutama di lokasi tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP)

Menunjang

Menurut KBBI (2020), Menunjang adalah menopang (menahan dan sebagainya) supaya jangan rebah (condong dan sebagainya), *bambu yang pagar itu sangat kokoh*, membantu kelancaran (usaha dan sebagainya) dengan uang dan sebagainya, *perlu adanya komunikasi sosial dalam usaha pembangunan*.

Distribusi

Menurut Rita Ambarwati dan Supardi (2020-879), Pengertian Distribusi secara umum definisi distribusi adalah aktivitas menyalurkan produk baik barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Terdapat pengertian distribusi yang lain, Distribusi adalah aktivitas pemasaran dalam rangka memudahkan dalam penyampaian produk dari tangan produsen kepada konsumen.

Logistik

Menurut Carunia Mulya Firdausy (2020-185). *Logistic* merupakan fungsi yang melibatkan perpindahan, mengatur perpindahan barang, dan penyimpanan material dalam perjalanannya dari pengiriman awal, melalui rantai pasok dan sampai ke pelanggan akhir. Logistik juga merupakan proses pertambahan nilai dengan cara menyediakan stok barang/bahan atau komponen dalam jumlah serta waktu yang tepat, sebagai kombinasi penataan permintaan, persediaan, transportasi/angkutan, pergudangan, pengelolaan barang sediaan, dan pengemasan terpadu dalam jaringan fasilitas tersebut. Daerah Tertinggal

Daerah Tertinggal

Menurut Lestary Wulandary (2025-20). Daerah tertinggal adalah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya memberikan ukuran objektif dan terukur dalam menetapkan serta menangani wilayah yang tertinggal.

3. METODE PENELITIAN

Metode Lapangan (*Field Research*)

Melalui metode observasi, penulis memperoleh informasi dan keterangan langsung di lapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peranan kapal Tol Laut dalam menunjang distribusi pada daerah tertinggal. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh data yang akurat serta pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan yang diteliti.

Metode Perpustakaan (*Library Research*)

Penulis memperoleh data dengan membaca buku-buku, catatan, arsip, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, misalnya dengan cara mencari buku di perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian Barang

Menurut Jarot Hanita dalam buku “Distribusi Farmasi” (2021-86). Pendistribusian barang atau jasa merupakan suatu proses kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Masalah transportasi merupakan masalah yang sering dihadapi dalam pendistribusian barang. Masalah lain yang sering dihadapi terkait distribusi adalah membuat keputusan rute yang dapat mengoptimalkan jarak tempuh atau biaya perjalanan, waktu tempuh, banyaknya kendaraan yang dioperasikan dan sumber daya lain yang tersedia.

Salah satu upaya strategis pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi antar wilayah adalah melalui program Tol Laut. Program ini diluncurkan sejak tahun 2015 sebagai bentuk komitmen negara dalam mengatasi ketimpangan distribusi barang, menurunkan disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Dalam konteks ini, tol laut berfungsi sebagai jalur pelayaran tetap dan terjadwal yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama dengan pelabuhan-pelabuhan kecil di wilayah pelosok, sehingga memungkinkan proses distribusi barang berjalan lebih lancar, efisien, dan terjangkau.

Distribusi barang melalui tol laut umumnya dimulai dari pengumpulan barang di pelabuhan besar, seperti Tanjung Perak di Surabaya atau Tanjung Priok di Jakarta, kemudian diangkut menggunakan kapal tol laut ke berbagai daerah tujuan. Barang-barang yang dikirim meliputi kebutuhan pokok, obat-obatan, alat kesehatan, bahan bangunan, hewan, hingga produk-produk industri dan pertanian.

Setiap aktivitas logistik selalu terdapat pemeriksaan kualitas, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pengiriman. Setiap saat kondisi barang akan selalu dicek dan diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku, hal tersebut dilakukan agar barang tidak mengalami rusak atau cacat sebelum diterima oleh pelanggan.

Sesampainya di pelabuhan tujuan, barang-barang ini didistribusikan lebih lanjut oleh pelaku usaha atau pemerintah daerah ke masyarakat. Kehadiran tol laut telah membantu menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi beban utama distribusi, terutama ke wilayah timur Indonesia. Penurunan biaya logistik ini berdampak langsung pada penurunan harga jual barang di daerah-daerah yang selama ini mengalami harga tinggi akibat transportasi yang mahal dan tidak terjadwal.

Namun demikian, pendistribusian barang melalui tol laut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketidakseimbangan arus barang, di mana kapal tol laut sering kali mengalami kekurangan muatan balik karena daerah tujuan belum mampu mengoptimalkan pengiriman barang kembali ke pelabuhan asal. Selain itu, infrastruktur pelabuhan di daerah masih terbatas, baik dari sisi fasilitas bongkar muat, gudang penyimpanan, maupun akses jalan penghubung ke daerah pedalaman. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku logistik juga menjadi hambatan tersendiri dalam memastikan distribusi berjalan optimal. Tak hanya itu, rendahnya pemahaman pelaku usaha kecil dan menengah terhadap mekanisme tol laut membuat potensi pemanfaatan layanan ini belum maksimal.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan berbagai upaya penguatan sistem distribusi yang terintegrasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan infrastruktur pendukung di pelabuhan-pelabuhan kecil, serta mendorong digitalisasi sistem logistik untuk menciptakan efisiensi dan transparansi. Selain itu, pemberdayaan pelaku usaha lokal agar dapat mengisi muatan balik, serta sosialisasi pemanfaatan tol laut secara intensif, juga perlu dilakukan. Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi semua pihak, program tol laut berpotensi menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat pendistribusian barang secara merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurunkan Disparatis Harga

Menurut Thamrin Dalam buku "Manajemen Transportasi Laut dan Maritim" (2025-114). Dengan jadwal yang teratur, pengiriman barang menjadi lebih terorganisir, mengurangi waktu tempuh, dan meningkatkan efisiensi distribusi barang. Memotong rantai distribusi yang sebelumnya terlalu panjang dan mahal.

Salah satu permasalahan utama dalam sistem perdagangan dan logistik di Indonesia adalah adanya disparitas harga yang tinggi antara wilayah barat dan wilayah timur, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Harga barang kebutuhan pokok di wilayah timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara umumnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan wilayah barat seperti Jawa dan Sumatra. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya logistik, terbatasnya jalur distribusi, serta minimnya infrastruktur pendukung.

Tol Laut adalah solusi yang ditawarkan untuk mengurangi disparitas harga yang timbul antara Indonesia Kawasan Barat dengan Indonesia Kawasan Timur. Tol Laut sendiri adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayani secara rutin dan terjadwal dari Kawasan Barat Indonesia ke Kawasan Timur Indonesia. Dengan tujuan untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan dan untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diwujudkan dengan cara mengadakan layanan pelayaran yang bersubsidi, rutin dan terjadwal. Sehingga disparitas yang tinggi antar wilayah Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia dapat menurun.

Melalui program Tol Laut, pemerintah menyediakan trayek pelayaran tetap dan terjadwal yang mengangkut barang dari pelabuhan utama di wilayah barat ke pelabuhan di daerah 3TP dengan biaya logistik yang disubsidi. Adanya jadwal pengiriman yang pasti serta keterlibatan BUMN dan pelayaran swasta membuat distribusi barang menjadi lebih lancar dan efisien. Barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, semen, dan bahan bangunan yang sebelumnya sulit diakses dan mahal, kini dapat dijual dengan harga yang lebih terjangkau di daerah tujuan. Dalam beberapa kasus, terjadi penurunan harga barang hingga 20–30 persen di wilayah yang secara aktif dilayani oleh Tol Laut. Hal ini menunjukkan bahwa Tol Laut memiliki dampak positif dalam mengurangi ketimpangan harga antarwilayah.

Namun, meskipun program Tol Laut telah mampu menekan disparitas harga, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan dalam pendistribusian akhir barang setelah tiba di pelabuhan tujuan. Dalam beberapa kasus, meskipun biaya logistik sudah ditekan, harga barang tetap tinggi di tingkat konsumen karena adanya praktik distribusi yang tidak efisien atau pengambilan keuntungan yang berlebihan oleh pihak tertentu. Selain itu, masih terdapat daerah yang belum terjangkau trayek Tol Laut secara optimal. Oleh karena itu, agar program ini benar-benar mampu menurunkan disparitas harga secara menyeluruh, dibutuhkan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, transparansi dalam rantai distribusi, serta pengawasan harga di tingkat pasar.

Pilihan strategi pengembangan tol laut sejatinya merupakan elaborasi dari pembangunan inklusif, yang lebih mengedepankan keadilan ekonomi dengan memberikan fokus perhatian lebih kepada wilayah Indonesia yang tertinggal terdepan dan terluar, agar dapat menikmati harga-harga komoditas kebutuhan pokok dan lainnya relatif sama dengan yang dinikmati oleh saudara-saudaranya di wilayah Indonesia lainnya. Tol laut sebagai sebuah konsep dirancang untuk memperkuat jalur pelayaran yang ditujukan bagi pemerataan pertumbuhan ke Indonesia bagian timur, menurunkan biaya logistik juga menjamin ketersediaan pokok strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga relatif sama sehingga kesejahteraan rakyat semakin merata. Melalui program tol laut diharapkan akan dapat mempercepat integrasi antara kawasan pelabuhan dengan kawasan industri dan kawasan ekonomi serta kluster-kluster ekonomi untuk menopang kebutuhan akan arus barang dan logistik di pelabuhan.

Meningkatkan Konektivitas

Konektivitas pelayaran perintis adalah salah satu kunci dalam meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kawasan yang berhubungan dengan berbagai infrastruktur terkait. Penyelenggaraan pelayaran perintis harus bisa berjalan lebih efisien dan inovatif, dengan harapan jika pelayaran perintis bisa lebih efisien tentunya akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pembiayaan penyelenggaraan angkutan laut perintis yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah terhentinya pelayanan kepada masyarakat ketika kapal perintis harus menjalani perawatan (*docking*) dan tidak tersedia kapal pengganti. Tol Laut dapat menghasilkan solusi agar pelayanan kapal perintis tidak terputus meskipun kapal yang melayani trayek tersebut masuk perawatan atau docking. Bila kapal perintis masuk docking, pelayanan kepada masyarakat sering mengalami hambatan karena ketidaktersediaan kapal pengganti.

Ketidaktersediaan kapal pengganti tersebut menyebabkan terganggunya distribusi barang dan mobilitas masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada kelangkaan barang, kenaikan harga, dan melambatnya aktivitas ekonomi lokal. Tol Laut, dengan sistem trayek tetap dan pengelolaan yang lebih terorganisir, dapat menyediakan dukungan berupa kapal cadangan atau integrasi trayek, sehingga pelayanan tidak terputus meskipun ada kapal yang harus masuk perawatan.

Agar pelayaran perintis dapat berjalan optimal, perlu adanya integrasi yang kuat antara program Tol Laut, operator pelayaran, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan logistik dan mobilitas masyarakat di wilayahnya, termasuk menentukan jenis komoditas yang dibutuhkan maupun yang dapat

dikirim balik ke daerah lain. Dengan pemetaan kebutuhan tersebut, trayek pelayaran perintis dapat disesuaikan agar lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

Selain itu, partisipasi aktif dari pelaku usaha lokal juga menjadi kunci agar muatan balik kapal perintis dapat dimaksimalkan, sehingga kapal tidak hanya mengangkut barang dari pusat ke daerah, tetapi juga membawa hasil produksi daerah ke pasar yang lebih luas. Dengan begitu, pelayaran perintis tidak hanya menjadi sarana distribusi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang berdaya saing.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan skala kecil, dermaga rakyat, dan fasilitas bongkar-muat juga sangat diperlukan agar layanan pelayaran perintis dapat berlangsung secara efektif. Tanpa infrastruktur yang memadai, kapal perintis akan mengalami kesulitan saat bersandar maupun saat proses distribusi barang dilakukan di darat. Selain infrastruktur fisik, penguatan sistem informasi logistik berbasis digital juga penting untuk memantau jadwal kapal, kapasitas muatan, dan pelaporan kondisi operasional secara *real-time*.

Menurut Kurniadi, Ibrahim dalam buku “*Public-Private Partnership*” (2022-69-70). Arah kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi laut, adalah:

- 1) Penegakan aturan standar keselamatan pelayaran.
- 2) Pemenuhan kecukupan perlengkapan sistem navigasi pelayaran, melalui penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan dan navigasi pelayaran, meningkatkan frekuensi pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran standar keselamatan pelayaran.
- 3) Standardisasi layanan pelabuhan-pelabuhan utama mendukung logistik.
- 4) Peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpulan dan pengumpan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan.
- 5) Pembangunan pelabuhan untuk mendukung aktivitas pariwisata.
- 6) Pengintegrasian jasa pelayaran komersial dengan sistem pelayaran non-komersial
- 7) Pengintegrasian jasa pelayaran lokal (pelayaran rakyat) dengan aiatem pelayaran nasional, melalui penyesuaian kedalaman alur dan kolam pelabuhan dengan *throughput* (atau ukuran kapal optimal). Integrasi layanan pelabuhan *hub* strategis tol laut, penyesuaian kerangka regulasi standar kinerja operasioanl pelabuhan dengan standardisasi khusus untuk pelabuhan-pelabuhan hub strategis tol laut berdasarkan naskah akademik yang kuat, integrasi sistem pemerintah.
- 8) Pengembangan sisitem teknologi informasi yang dapat mendukung kelancaran aktivitas pelayaran angkutan laut.
- 9) Peningkatan jumlah *coverage* dan frekuensi pelayanan angkutan perintis yang kompherensif (saling melenglapi dan terpadu antar layanan perintis).

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Keberadaan kapal Tol Laut yang dioperasikan oleh PT. Subsea Lintas Globalindo Cabang Tanjung Perak Surabaya memainkan peranan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Sebagai salah satu operator pelayaran yang ditunjuk pemerintah, perusahaan ini mengambil bagian dalam pelaksanaan program strategis nasional Tol Laut yang bertujuan mengurangi ketimpangan antarwilayah, khususnya dalam aspek distribusi logistik. Kapal-kapal Tol Laut yang dikelola PT. Subsea Lintas Globalindo mampu menjangkau wilayah 3TP (tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan) yang sebelumnya sulit dijangkau oleh distribusi reguler akibat keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya transportasi.

Melalui trayek tetap yang beroperasi secara terjadwal, kapal-kapal Tol Laut mendistribusikan berbagai jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, seperti beras, minyak goreng, gula, obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan bangunan. Kelancaran arus barang ini berkontribusi langsung terhadap stabilitas harga dan ketersediaan barang di daerah tujuan. Akibatnya, masyarakat tidak lagi harus membayar harga tinggi akibat biaya distribusi yang mahal. Penurunan disparitas harga ini juga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan menggerakkan sektor perdagangan lokal. Distribusi logistik yang lancar menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal.

Di sisi lain, kapal Tol Laut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengangkut barang dari pusat ke daerah, tetapi juga sebagai media penghubung ekonomi daerah dengan pasar nasional. PT. Subsea Lintas Globalindo mendukung muatan balik, yaitu pengangkutan produk-produk lokal dari daerah tujuan ke pelabuhan utama seperti Tanjung Perak Surabaya. Produk-produk lokal seperti hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan daerah kini memiliki akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya kepastian pengiriman dan biaya logistik yang lebih rendah, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tertinggal terdorong untuk meningkatkan produksinya dan terlibat dalam rantai pasok nasional.

Lebih jauh, layanan kapal Tol Laut juga memicu pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, seperti jasa pengemasan, pengangkutan darat, pergudangan, dan layanan pelabuhan di daerah-daerah tujuan. Ini menunjukkan bahwa distribusi logistik melalui Tol Laut memiliki efek multiplikatif terhadap pembangunan ekonomi lokal. Pertumbuhan ini juga membuka peluang kerja baru dan mendorong pengembangan SDM di wilayah yang selama ini relatif tertinggal secara ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan kapal Tol Laut tidak hanya memberikan solusi logistik, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah-daerah tersebut.

Namun demikian, untuk mencapai hasil yang optimal, dukungan dari berbagai pihak tetap diperlukan. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memfasilitasi pelaku usaha lokal agar dapat memanfaatkan fasilitas Tol Laut secara maksimal, terutama dalam mengelola muatan balik. Selain itu, penguatan infrastruktur pelabuhan kecil, sistem distribusi darat, dan peningkatan kapasitas SDM juga menjadi faktor penting yang harus dibenahi. PT. Subsea Lintas Globalindo, sebagai operator, juga dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga kualitas layanan agar kepercayaan masyarakat terhadap Tol Laut semakin meningkat. Dengan sinergi antara pemerintah, operator pelayaran, pelaku usaha, dan masyarakat, program Tol Laut dapat menjadi tulang punggung dalam pembangunan ekonomi daerah yang merata dan berkelanjutan.

Integrasi sistem logistik

Lebih dari sekadar sarana transportasi laut, Tol Laut berperan sebagai penghubung strategis dalam sistem logistik nasional yang menyelaraskan pergerakan barang lintas wilayah dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, integrasi sistem logistik bukan hanya berarti keterhubungan fisik antar moda transportasi, tetapi juga mencakup penyatuan proses perencanaan, pengelolaan data logistik, serta kolaborasi antar-pelaku logistik. Misalnya, dengan adanya sistem logistik terintegrasi, jadwal kapal Tol Laut dapat disesuaikan dengan waktu tiba truk pengangkut dari pusat distribusi darat atau kapal pengumpan dari pelabuhan kecil, sehingga tidak terjadi penumpukan kontainer atau keterlambatan distribusi barang.

Selain itu, sistem integrasi ini memperkuat pengawasan dan efisiensi dalam proses distribusi. Misalnya, aplikasi digital yang terhubung antar pelabuhan, operator, dan pengguna jasa logistik dapat meminimalisir praktik penyimpangan seperti penyalahgunaan kontainer, keterlambatan pengiriman, dan biaya siluman. Hal ini sangat penting, terutama dalam pengiriman barang-barang kebutuhan pokok dan barang bersubsidi ke wilayah 3TP, yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap keterlambatan distribusi. Dengan data logistik yang saling terintegrasi, pemerintah dapat melakukan pengawasan stok, pergerakan barang, dan kebutuhan wilayah secara real-time sehingga intervensi logistik bisa lebih cepat dan tepat sasaran.

Dalam praktiknya, keberhasilan integrasi sistem logistik melalui Tol Laut sangat ditentukan oleh kemampuan semua pihak untuk membangun kolaborasi dan standarisasi sistem. Peran operator seperti PT. Subsea Lintas Globalindo sangat penting dalam menjaga ketepatan waktu pelayaran, kapasitas muatan, dan pengelolaan kontainer agar sesuai dengan perencanaan distribusi nasional. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus aktif menyediakan data kebutuhan daerah, mendukung kelengkapan infrastruktur pelabuhan pengumpan, serta menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten dalam pengelolaan logistik. Tanpa dukungan

dari berbagai pemangku kepentingan, integrasi sistem logistik hanya akan menjadi konsep di atas kertas yang sulit diimplementasikan secara nyata.

Melalui penguatan integrasi ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menurunkan biaya logistik nasional yang selama ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dengan biaya logistik yang lebih rendah, daya saing produk lokal akan meningkat, sehingga dapat memperluas akses pasar nasional maupun ekspor. Terlebih, dalam jangka panjang, sistem logistik yang terintegrasi akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional karena mampu menjamin ketersediaan barang secara merata, bahkan di wilayah paling terpencil sekalipun. Oleh karena itu, Tol Laut harus terus dikembangkan bukan hanya sebagai program pengiriman barang, tetapi sebagai sistem logistik maritim nasional yang terkoordinasi, efisien, dan *inklusif*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program Tol Laut memiliki peranan strategis dalam menunjang distribusi logistik ke daerah tertinggal. Melalui kapal-kapal yang melayani trayek tetap ke wilayah 3TP, program ini memperlancar pengiriman barang kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dampaknya, disparitas harga antarwilayah berhasil ditekan, sehingga harga barang menjadi lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, Tol Laut meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas produksi dan perdagangan. Program ini juga mendukung terwujudnya integrasi sistem logistik nasional yang lebih efisien, terkoordinasi, dan berbasis teknologi. Dengan demikian, Tol Laut bukan sekadar sarana distribusi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pemerataan pembangunan ekonomi maritim di seluruh wilayah Indonesia.

Saran

Agar program Tol Laut dapat berjalan lebih optimal dalam menunjang distribusi logistik ke daerah tertinggal, diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator pelayaran seperti PT. Subsea Lintas Globalindo, dan pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif dalam mendata kebutuhan logistik masyarakat dan mendukung pemanfaatan muatan balik untuk produk lokal. Selain itu, perlu adanya peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpan, konektivitas transportasi darat, serta dukungan teknologi informasi guna memperkuat integrasi sistem logistik, menjaga ketepatan jadwal pelayaran dan kualitas layanan agar manfaat Tol Laut dapat dirasakan secara berkelanjutan.

oleh masyarakat di wilayah 3TP. Terakhir, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap jalur dan efektivitas distribusi, agar program Tol Laut benar-benar menjadi solusi nyata dalam pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Ambarwati, R., & Supriadi. (2020). Manajemen operasional dan implementasi dalam industri. Magelang: Pustaka Rumah Cinta.
- Hasan I., Nur, T. A., & Verdifauzi, A. (2020). Optimalisasi program tol laut terhadap penurunan disparitas harga: Suatu tinjauan analisis. Jurnal Penelitian Transportasi Laut, 22, 1–12. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/JurnalLaut-1315-3757%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/JurnalLaut-1315-3757%20(1).pdf)
- Hermawan, J. Y., & Christiandari, H. (2021). Distribusi farmasi. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Kurniadi, I. (2022). Public-private partnership. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Manatuto, A. (2020). Analisa program tol laut terhadap ketersediaan logistik di wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) di Indonesia. Semarang: Pip Semarang. https://repository.pipsemarang.ac.id/2691/2/531611306196K_SKRIPSI_OPEN%20ACCES.pdf
- Mauleny, T., Alhusain, S., et al. (2020). Memajukan logistik Indonesia yang berdaya saing. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasution, P. D. V., Dirhamsyah, D., & Sabila, F. H. (2024). Implementasi sistem Inaportnet dalam pelayanan kapal di Terminal Sarana Citra Nusa Kabil pada PT. Snepac Shipping Batam. Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan, 2(4), 265–271.
- Pane, H. C., Ginting, D., & Sabila, F. H. (2024). Sistem pengembalian dan pengambilan container empty di depo PT. Tanto Intim Line Cabang Medan Belawan. Jurnal Adiguna Maritim Indonesia, 1(2), 49–53.
- Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. Jurnal Adiguna Maritim Indonesia, 2(1), 22–25.
- Sabila, F. H., & Bancin, S. B. (2024). Proses bongkar muat container di depo oleh PT Prima Indonesia Logistik Belawan. Journal of Maritime and Education (JME), 6(1), 55–61.
- Sitompul, G. F., Deliana, M. K., & Sabila, F. H. (2024). Transportation process of container goods from Container Freight Station to container yard at port of PT. Elang Sriwijaya Perkasa Palembang. Pusat Publikasi Ilmu Manajemen, 2(3), 296–300.
- Thamrin. (2025). Manajemen transportasi laut dan maritim. Yogyakarta: K-Media.

Utomo, P. B. (2025). Sistem logistik ikan nasional. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.

Wulandari. (2025). Hukum perjanjian dalam pembangunan daerah tertinggal. Malang: Kramantara Jaya Sentosa.

Zarman, N., & Karollah, B. (2023). Manajemen sumber daya manusia. Banda Aceh: Bandar Publishing.